

BAB I

LATAR BELAKANG AMERIKA SERIKAT MENGHAPUS EMBARGO SENJATA TERHADAP VIETNAM TAHUN 2014

A. Alasan Pemilihan Judul

Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang lalu, jajaran militer Amerika Serikat (USA) Jenderal Martin E. Dempsey, merupakan salah satu orang terpenting dalam jajaran militer Amerika Serikat, melakukan kunjungan ke Vietnam selama empat hari. Bila dilihat dari sejarahnya hubungan antara Amerika dan Vietnam kurang harmonis dikarenakan perang dimasa lalu yaitu perang Vietnam.¹ Jenderal Dempsey, selaku Kepala Staff Gabungan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat dipercaya untuk memimpin misi diplomatik untuk bertemu dengan para petinggi Vietnam. Dalam waktu yang bersamaan petinggi Amerika Serikat juga berkunjung ke Vietnam yaitu Senator John McCain, yang merupakan tokoh Republikan. John McCain berpadangan bahwa sudah saatnya untuk meninjau ulang embargo senjata terhadap Vietnam sehingga Amerika Serikat bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya.

Berdasarkan sejarah, hubungan yang kurang harmonis antara Amerika Serikat dan Vietnam dikarenakan kedua negara pernah berperang. Hubungan yang kurang harmonis selama ini menjadi hambatan bagi kedua negara melakukan kerjasama, akan tetapi kunjungan petinggi Amerika Serikat ke Vietnam menjadi sebuah identifikasi bagi peneliti bahwa Amerika Serikat mencoba untuk membangun kembali hubungan diplomatik dengan Vietnam

¹*Mendekatnya AS dan Vietnam*, Dikutip dari "Harian Kompas" Selasa 19 Agustus 2014

Berdasarkan hal tersebut, penulis memilih judul **“Latar Belakang Amerika Serikat Menghapus Embargo Senjata Terhadap Vietnam Tahun 2014”**.

Dan yang terpenting, judul ini sangat menarik untuk diangkat sebab peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai alasan Amerika Serikat membuat kebijakan luar negerinya tersebut kepada Vietnam.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan historis, Vietnam merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang memiliki riwayat penjajahan yang cukup panjang. Wilayah ini pernah dikuasai China selama puluhan abad di masa lampau sehingga kultur politik China (sosialis-komunis) sangat kuat. Kemudian di era modern, Vietnam menjadi wilayah jajahan negara Eropa diantaranya Perancis yang menguasai Vietnam setelah melakukan beberapa perang kolonial di Indocina. Ekspansi kekuasaan Perancis disebabkan keinginannya untuk menyaingi kebangkitan Britania Raya dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil bumi seperti rempah-rempah guna menggerakkan industri di Perancis.

Pada di tahun 1954, nasionalis Vietnam berjuang untuk kemerdekaan penuh mengalahkan Perancis. Dari semangat ingin memerdekakan diri, terjadilah pertempuran pasukan nasionalis (Ho Chi Minh) Vietnam melawan Perancis. Perang ini dikenal dengan sebutan pertempuran Dien Bien Phu, Dien Bien Phu yaitu nama kota di Vietnam yang menjadi pusat pertempuran Vietnam dan Perancis. Pertempuran Dien Bien Phu menjadi pertempuran final dalam perang Indocina babak pertama antara Perancis dan Revolusioner Vietnam (Viet Minh).

Pertempuran ini terjadi antara bulan Maret dan Mei 1954, dan berakhir dengan kekalahan Militer Perancis. Pasukan infanteri Viet Minh mengibarkan bendera kemenangan di Dien Bien Phu.

Setelah pertempuran Dien Bien Phu, perang ini berakhir dengan persetujuan Jeneva, yaitu persetujuan menghentikan perang Indocina yang dilakukan pada 8 Mei 1954. Persetujuan ini membagi Vietnam menjadi dua wilayah yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Namun demikian perdamaian yang singkat itu segera berantakan. Pertempuran kembali pecah pada tahun 1957 yang dikenal dengan perang Vietnam atas dasar ideologi. Perang Vietnam ini merupakan salah satu hasil dari intervensi asing yaitu Amerika Serikat dalam konflik antar kedua wilayah ini. Perang Vietnam ini terjadi ketika dunia diwarnai dengan perang antara blok barat (Amerika Serikat) dan blok timur (Uni Soviet) dalam penanaman ideologi masing-masing.

Perang Vietnam, yang disebut juga Indocina kedua adalah sebuah perang yang terjadi antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1975. Perang ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu Komunis dan Liberal. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan. Sedangkan Uni Soviet dan China bersekutu dengan Vietnam Utara.

Perang ini berawal dari perang saudara (civil war) menjadi konflik internasional, yang pada akhirnya melibatkan Amerika Serikat. Pada saat itu

Amerika Serikat berusaha untuk menghentikan penyebaran ideologi komunis. Perang ini menjadi salah satu konflik pada masa perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Perang seperti ini disebut sebagai perang Proksi karena Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri tidak pernah bertatap muka secara terang-terangan di medan pertempuran, karena khawatir akan meletusnya perang nuklir.

Upaya Amerika Serikat untuk memenangkan perang ini dengan menggunakan berbagai macam cara, selain tentara-tentara dan peralatan perangnya di turunkan langsung untuk bertempur di medan perang, Amerika Serikat juga melakukan Embargo Senjata terhadap Vietnam, yang bertujuan agar pasokan senjata (peralatan perang) Vietnam habis, Sehingga Amerika Serikat dapat mudah mengalahkan tentara-tentara Vietnam. Tidak sampai disitu, Amerika Serikat juga melakukan Embargo Ekonomi terhadap lawannya tersebut, tujuannya tidak lain untuk menjatuhkan perekonomian Vietnam,² karena negara yang perekonomiannya rendah pasti pertahanannya dan keamanannya juga lemah. Bisa dikatakan Vietnam pada saat itu adalah salah satu negara yang paling melarat karena Vietnam tidak memiliki rekan untuk melakukan kerjasama demi kelangsungan perekonomian dan pertahanannya, melihat juga posisi Vietnam pada saat itu sedang melakukan peperangan meski pada akhirnya Vietnam mampu merdeka. Orang-orang Amerika menyebut perang tersebut adalah Perang Vietnam, tetapi orang Vietnam sendiri menyebut perang tersebut yaitu “Perang Keselamatan Nasional Anti Amerika Serikat”.

² ² *Vietnam tikus yang siap jadi macan*, diakses pada tanggal 12 Maret 2015, pukul 12:24
<http://internasional.kompas.com/read/2009/10/09/08064921/Vietnam..Tikus.yang.Siap.Jadi.Macan>

Perang ini menyebabkan banyak korban jiwa. Pada akhir tahun 1969 jumlah korban mencapai 475.200 orang, dan sampai saat itu prajurit Amerika yang tewas mencapai 40.024 orang. Jumlah pasukan negara sekutu Amerika Serikat mencapai puncaknya, 70.300 orang. Sedangkan dari angkatan bersenjata Vietnam Selatan sendiri 897.000, dengan korban tewas sampai saat itu telah mencapai 110.176 orang.³ Tidak hanya korban jiwa, kerugian cukup besar dirasakan oleh Vietnam, bangunan-bangunan dan fasilitas negara hancur porak-poranda akibat perang tersebut, sehingga berdampak pada perkembangan negara Vietnam itu sendiri.

Pada 27 Januari 1973, Perjanjian Damai Paris (Paris Peace Accords) dilakukan. Isi perjanjian tersebut adalah, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan siap untuk berdamai, dan kedua belah pihak hanya dapat berkuasa di wilayahnya masing-masing.⁴ Pada 29 Maret 1973 seluruh pasukan perang Amerika Serikat ditarik. Pertempuran kecil antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan masih berlanjut tetapi semua pertempuran besar telah berakhir, hingga pada akhirnya Vietnam Utara dapat menginvasi dan menundukkan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Vietnam Selatan dengan singkat menjadi Republik Vietnam Selatan, sebuah negara boneka di bawah kekuasaan militer Vietnam Utara, sebelum secara resmi disatukan dengan Vietnam Utara di bawah pemerintahan Komunis sebagai Republik Sosialis Vietnam pada 2 Juli 1976.

³ *Sepuluh Perang Terdasyat Sepanjang Sejarah Dunia*, diakses pada tanggal 09 Februari 2015, pada pukul 22.19 Wib, dari <http://www.lihat.co.id/2014/05/10-Perang-Terdasyat-Sepanjang-Sejarah-Dunia.html#axzz3RGGnivnM>

⁴ *United States–Vietnam relations* - Wikipedia, the free encyclopedia.htm, diakses 19 September 2014

Pasca perang Vietnam bersikeras menuntut bantuan ekonomi pada Amerika Serikat sebagai kompensasi terhadap kerugian akibat perang yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Pada pertengahan tahun 1978, menyadari bahwa negaranya akan semakin terpuruk tanpa adanya kerjasama atau bantuan dari negara lain. Menteri luar negeri Vietnam Nguyen Co Thach dan pemerintah Amerika Serikat melakukan pertemuan sehingga mencapai kesepakatan prinsip mengenai normalisasi, selepas dari pertemuan tersebut, hubungan kedua negara terus-menerus berangsur membaik.

Pada tahun 1994 Amerika Serikat mencabut Embargo Ekonomi terhadap Vietnam dan secara resmi memberikan bantuan ekonomi untuk Vietnam. Hal itu merupakan langkah penting menuju tercapainya rekonsiliasi antara kedua negara. Setahun kemudian secara formal normalisasi hubungan diplomatik Amerika Serikat dan Vietnam berlangsung pada tahun 1995, Pasca normalisasi hubungan diplomasi kedua Negara mengalami peningkatan dalam hubungan bilateral antara Vietnam dan Amerika Serikat di bidang ekonomi dan sosial.⁵

Pada tanggal 14 Agustus 2014 lalu kunjungan Jenderal Angkatan Darat dan menjabat sebagai kepala staf gabungan Amerika Serikat Jenderal Martin E. Dempsey dalam acara penyambutan di Kementerian Pertahanan Vietnam di Hanoi, selain Jenderal Dempsey, tokoh Amerika Serikat yang berkunjung ke Vietnam adalah Senator John McCain, partai republik dari Arizona. Dalam jumpa

⁵Tian Setyaning K. *Kerjasama Militer Vietnam-Amerika Serikat Tahun 2010-2013*. HI 2009. Hal.1.

pers Jhon McCain mengatakan bahwa saatnya telah tiba meninjau ulang embargo senjata terhadap Vietnam.⁶

Kementerian Luar Negeri Amerika menegaskan kebijakan ini diambil seiring hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam yang semakin akrab.⁷ Akhirnya Amerika Serikat mencabut larangan penjualan senjata terhadap Vietnam pada akhir tahun 2014 lalu, meskipun pencabutan larangan penjualan senjata tersebut tidak diberlakukan secara keseluruhan, melainkan hanya perlengkapan untuk maritim.

Menurut Juru bicara Pemerintah Vietnam, Nguyen Van Nen, Vietnam dan Amerika Serikat telah menggalang hubungan kemitraan komprehensif, maka penghapusan embargo tersebut akan menjadi aktivitas yang memanasikan saling percaya menurut semangat berkiblat ke perkembangan yang lebih komprehensif dalam hubungan antara dua negara. Hal ini juga akan turut menciptakan syarat yang lebih kondusif lagi kepada Vietnam untuk menjamin pertahanan dan keamanan nasional.⁸

Melihat permasalahan ini mendorong penulis untuk melakukan analisa terhadap kepentingan Amerika Serikat datang ke Vietnam pada tahun 2014, melihat hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam selama ini kurang harmonis disebabkan oleh sejarah kelam saat itu.

⁶ Tajuk Rencana: *Mendekatnya AS dan Vietnam*. Kompas, Selasa 19 Agustus 2014.

⁷ *AS Cabut Embargo Penjualan Senjata ke Vietnam*. Diakses pada tanggal 9 februari 2015, pukul 23:04 WIB, dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/03/118611731/AS-Cabut-Embargo-Penjualan-Senjata-ke-Vietnam>

⁸ *Penghapusan embargo AS atas penjualan senjata pembunuh kepada Vietnam merupakan tindakan positif*, diakses pada tanggal 20 februari pukul 01:55 <http://vovworld.vn/id-ID/Berita/Penghapusan-embargo-AS-atas-penjualan-senjata-pembunuh-kepada-Vietnam-merupakan-tindakan-positif/274833.vov>

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

Mengapa Amerika Serikat menghapus embargo senjata terhadap Vietnam pada tahun 2014?

D. Tujuan Penulisan

Melalui penulisan skripsi ini, beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, sebagai berikut:

1. Mengetahui lebih dalam mengenai kepentingan Amerika Serikat ke Vietnam pada tahun 2014.
2. Mengetahui kendala hubungan bilateral Vietnam dan Amerika Serikat.
3. Mengetahui permasalahan yang bersifat krusial antara Vietnam dan Amerika Serikat.

E. Kerangka Pemikiran

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Konsep kebijakan Politik luar negeri merupakan serangkaian kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka hubungannya dengan dunia internasional, dengan kata lain kebijakan luar negeri adalah cara dalam usaha mencapai tujuan nasional. Dimana kebijakan tersebut merupakan akumulasi dari kepentingan rakyat yang disebut sebagai kepentingan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Dengan kata lain, politik luar negeri adalah pola perilaku yang digunakan oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Hal ini sejalan

dengan definisi yang disebutkan Goldstein, ”*Foreign policies are the strategies used by governments to guide their actions in the international arena* (Politik luar negeri adalah strategi yang digunakan pemerintah sebagai pedoman tindakan dalam kancah internasional).⁹

Menurut K. J. Holsti, kebijakan luar negeri adalah tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan, yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari Negara. Sumber –sumber dalam kebijakan luar negeri sebuah Negara antara lain meliputi :

a. External Sources

Sumber-sumber eksternal merupakan perangkat dari sistem internasional untuk mempengaruhi karakteristik dan tingkah laku negara dan non negara. Ini termasuk semua aspek bentuk eksternal.

b. Societal Sources

Sumber-sumber kemasyarakatan merupakan aspek dari non pemerintah dari suatu sistem politik yang mempengaruhi tingkah laku eksternal negaranya.

c. Governmental Sources

Sumber-sumber dari pemerintahan merupakan aspek-aspek dari struktur pemerintah yang membatasi atau menambah suara-suara dalam pembuatan kebijakan luar negeri Amerika.

d. Role Sources

⁹Mohtar Mas’oed. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES: Yogyakarta, 1994

Sumber-sumber peran merupakan hal yang penting karena pembuat keputusan dipengaruhi oleh tingkah laku sosial dan norma-norma yang legal dalam peran yang dipegang oleh seseorang. Posisi pembuat keputusan memegang tingkah laku mereka dan masukan bagi kebijakan luar negeri.

e. Individual Sources

Sumber-sumber individu merupakan karakteristik seseorang yang mempengaruhi tingkah laku dan pembuatan kebijakan luar negeri. Seperti karakteristik seorang presiden yang berpengaruh terhadap tingkah laku politik luar negerinya.¹⁰

Melihat sumber-sumber kebijakan luar negeri, dari tipologi K. J. Holsti, penulis menilai korelasi kepentingan Amerika Serikat dalam pembuatan kebijakan luar negerinya dengan Vietnam melalui *Governmental Source* dan *Role Source*.

Governmental Source dilihat melalui keputusan dari pembuat kebijakan di Amerika Serikat yang ingin menjalin kerjasama dibidang militer dengan Vietnam.

Sedangkan *Role Source*, penulis melihat adanya peranan kelompok-kelompok atau organisasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tersebut.

2. Proses Pembuatan Keputusan

Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Dalam tulisan ini, untuk menjelaskan tentang

¹⁰ Mohtar Mas'ood. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES: Yogyakarta, 1994

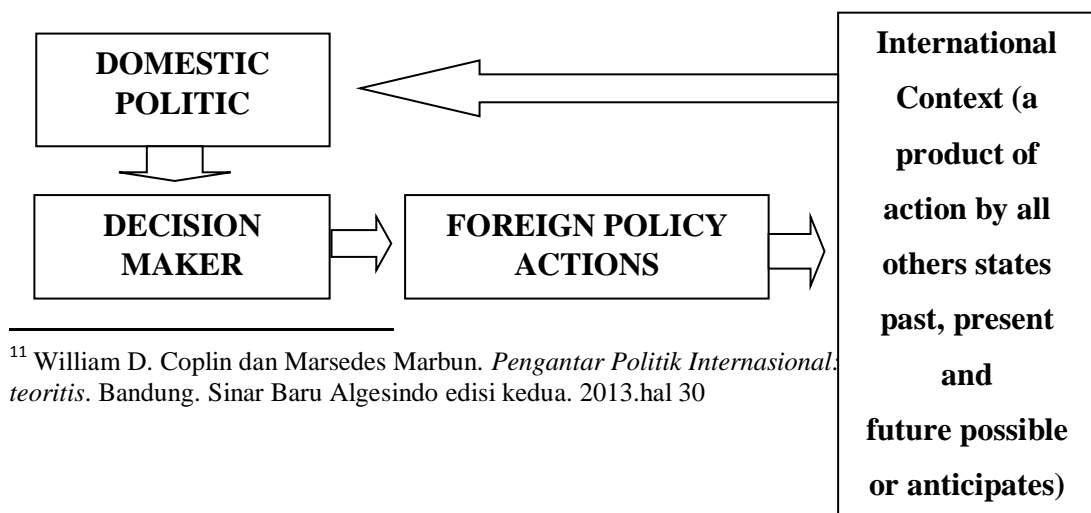
kebijakan yang ditempuh oleh Amerika Serikat terhadap Vietnam, penulis menggunakan pendekatan Teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Politik Internasional”. Teori ini akan menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan beserta hal-hal yang mempengaruhinya.

William D Coplin menggambarkan teori Pembuatan Keputusan Luar Negeri dalam sebuah model, sehingga membantu menjelaskan bagaimana proses pengambilan keputusan suatu negara. Pembuatan Keputusan Luar Negeri dibuat atas pengaruh dari pertimbangan-pertimbangan tertentu. Menurut Coplin sendiri, ada tiga yang mempengaruhi para pengambil keputusan luar negeri dalam membuat kebijakan luar negeri suatu negara. Ketiga pengaruh tersebut yaitu; pertama, Kondisi Politik dalam Negeri, kedua adalah Kapabilitas Ekonomi dan Militer dan yang ketiga adalah Konteks Internasional¹¹.

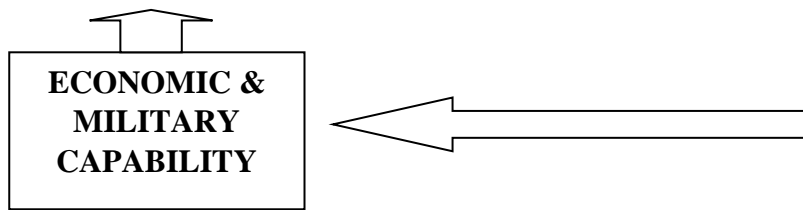
Berikut adalah model teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri:

Gambar 1. 1

Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri Menurut William D. Coplin



¹¹ William D. Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: teoritis*. Bandung. Sinar Baru Algesindo edisi kedua. 2013.hal 30



a. Kondisi Politik Dalam Negeri

Menurut Coplin, untuk menjelaskan peran politik dalam negeri dalam pengambilan keputusan luar negeri terdapat asumsi yang mendasar tentang perbedaan yang bersifat lintas nasional. Dengan kata lain, keputusan luar negeri merupakan hasil dari proses politik dalam negeri yang melibatkan berbagai aktor dalam kondisi-kondisi tertentu. Terjadi interaksi antara pengambil kebijakan luar negeri dengan aktor-aktor politik dalam negeri yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan luar negeri atau dalam bahasan Coplin disebut dengan “policy influencer”. Interaksi tersebut terangkai dalam sistem pengaruh kebijakan. Dalam hal ini penulis mengaplikasikan permasalahan dengan Teori William D. Coplin dalam model Kondisi Politik Dalam Negeri.

Dalam permasalahan ini, penulis melihat hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam yang kurang harmonis dikarenakan sejarah kedua negara yang kelam sehingga mempengaruhi juga kondisi politik kedua negara. Amerika Serikat berusaha memperbaiki hubungannya dengan Vietnam, hal tersebut dilakukan karena adanya tuntutan dari aktor-aktor politik dalam negeri Amerika Serikat agar membuat kebijakan penghapusan Embargo terhadap Vietnam, tujuannya agar hubungan Amerika Serikat dengan Vietnam dapat lebih baik dan melupakan sejarah kedua negara yang pernah berperang.

b. Kemampuan Ekonomi dan Militer

Analisa Coplin tentang faktor ekonomi dan militer dalam mempengaruhi pengambilan keputusan berangkat dari perilaku raja-raja Eropa abad pertengahan. Ekonomi dan militer merupakan dua variable yang saling berkaitan satu sama lain. Ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi¹². Dan sebaliknya, ketika kemampuan ekonomi semakin kuat maka akan berimbas pada peningkatan kekuatan militernya. Kedua variable ini juga yang menurut Coplin menjadi modal utama negara-negara Eropa menjajah Asia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan dagang Eropa datang tidak hanya membawa misi ekonomi, namun lebih kepada penaklukan wilayah dengan dukungan kekuatan militer yang lebih kuat.

Coplin mencontohkan Uni Soviet dan Amerika Serikat yang keduanya pada saat itu terlibat perlombaan senjata dalam Perang Dingin. Kedua negara merupakan negara yang telah makmur secara ekonomi. Ekonomi negara didukung oleh sektor industri modern, sehingga mampu untuk memproduksi peralatan militer yang lebih canggih.

Dengan kemampuan ekonomi dan militer yang kuat, maka negara tertentu akan lebih aktif dalam “panggung” politik internasional. Khusus militer, Coplin menerangkannya dengan tiga kriteria utama, yaitu; jumlah pasukan, tingkat pelatihan dan sifat perlengkapan militernya. Ketiga kriteria tersebut merupakan pembeda kekuatan-kekuatan militer suatu negara. Dengan merujuk

¹² William D. Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah teoritis*. Bandung. Sinar Baru Algesindo edisi kedua. 2013.hal 122

pada ketiga kriteria tersebut, pengambil keputusan luar negeri dapat melihat sejauh mana akan efektif.

Misalnya Amerika Serikat, paska Perang Dingin negara ini semakin agresif menggunakan kekuatan militer untuk mendukung kepentingan nasionalnya dan memiliki pengaruh yang kuat untuk merubah sistem politik internasional. Dengan kata lain, kemampuan Ekonomi dan Militer sebuah negara dapat mempengaruhi posisi tawar (bargaining position) dimata negara lain. Sehingga akan menentukan sikap negara lain terhadap kebijakan luar negeri suatu negara. Kekuatan Ekonomi dan Militer merupakan dua unsur penting yang mempengaruhi kapabilitas negara untuk memberikan tekanan terhadap negara lain. Ekonomi dan militer merupakan salah satu dari kapabilitas yang dibutuhkan negara untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional.

Dalam model Kemampuan Ekonomi dan Militer ini, penulis mencontohkan dengan rumusan masalah dalam penulisan ini, dimana Amerika Serikat sebagai negara maju yang otomatis ekonomi dan militernya juga lebih maju dibandingkan Vietnam yang masih negara berkembang. Memanfaatkan kelebihan ekonomi dan militernya, Amerika Serikat ingin membantu kekuatan militer Vietnam dengan membuat kebijakan penghapusan Embargo Senjata yang dilakukan 2014 lalu.

c. Konteks Internasional

Konteks internasional menjelaskan mengapa suatu negara berperilaku tertentu terhadap negara lain. Konteks internasional ini berkaitan dengan geopolitik suatu negara dan ilmuwan realis telah memberikan penjelasannya.

Hans J. Morgenthau berargumen bahwa setiap negara memiliki hubungan tertentu dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif. Kepentingan nasional ini dianggap menentukan politik luar negeri suatu negara. Konteks internasional juga dapat digunakan untuk memetakan negara mana yang kawan dan yang lawan.

Menurut Coplin ada tiga elemen dasar dalam menjelaskan konteks internasional terhadap kebijakan luar negeri suatu negara, yaitu geografis, ekonomis dan politis¹³. Lingkungan internasional setiap negara merupakan wilayah yang ditempatinya berkenaan dengan lokasi dan kaitannya dengan negara-negara lain dalam sebuah sistem politik internasional. Keterkaitan tersebut termasuk dalam bidang ekonomi dan politik. Namun geografi lebih memainkan peranan yang penting, faktor geografi merupakan yang utama dalam terciptanya organisasi lintas negara seperti Uni Eropa, NATO, ASEAN dll. Sehingga tercipta hubungan-hubungan politik dan ekonomi antar sesama negara anggota. Pengambil kebijakan luar negeri harus melihat itu dalam membuat keputusan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis lebih memfokuskan penelitian dalam konteks internasional, penulis melihat bahwa Amerika Serikat berusaha memperbaiki hubungannya dengan Vietnam melalui menghapus beberapa Embargo yang pernah diberikan terhadap Vietnam, dilihat dari penghapusan Embargo Ekonomi pada 1994 dan menghapus Embargo Militernya pada 2014 lalu. Penulis melihat upaya Amerika Serikat menghapus Embargo Militer pada 2014 tersebut dilakukan karena melihat isu Internasional yang melibatkan

¹³ ¹³ William D. Coplin dan Marsedes Marbun. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah teoritis*. Bandung. Sinar Baru Algesindo edisi kedua. 2013.hal 167

Vietnam dengan China pada konflik laut China selatan. Amerika Serikat beranggapan apabila Vietnam tidak dibantu dibidang keamanan militernya, maka China dapat mudah menguasai kembali Vietnam yang menjadi bekas wilayah jajahannya tersebut, dan mempengaruhi negara-negara di ASEAN, melihat China yang letak geografisnya lebih dekat dengan ASEAN dan memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap ASEAN. Inilah yang menjadi ketakutan Amerika Serikat sehingga menghapus Embargo Militer di tahun 2014 lalu terhadap Vietnam.

F. Hipotesa

Dari fakta dan konsep yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan hipotesis sementara dari permasalahan yaitu mengapa Amerika Serikat menginisiasi untuk menghapus embargo senjata terhadap Vietnam pada tahun 2014 sebagai berikut:

Amerika Serikat ingin membendung kekuatan Militer China di Kawasan Laut China Selatan melalui Vietnam.

G. Jangkauan penelitian

Jangkauan penelitian ini ditujukan untuk mempermudah menganalisa permasalahan yang dirumuskan. Peneliti memulai pencarian data pada bulan agustus 2014 dimana pada waktu itu amerika melakukan kunjungannya ke Vietnam. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil data sebelum bulan tersebut untuk memperkuat analisa dan memperoleh fakta yang terkait permasalahan tersebut.

H. Teknik pengumpulan data

Data penelitian diperoleh melalui pengumpulan data sekunder yaitu studi dokumen antara lain melalui sumber informasi relevan seperti buku, jurnal, majalah, berita dan surat kabar, juga sumber dari internet yang terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan skripsi ini dipaparkan sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini menguraikan alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II : Memaparkan sejarah Vietnam dan apa penyebab terjadinya perang Vietnam, serta adanya campur tangan Amerika Serikat.

BAB III : Membahas hubungan bilateral antara Amerika Serikat dengan Vietnam pasca perang, dan pasca Normalisasi sehingga terjadinya pencabutan Embargo.

BAB IV : Pembuktian tentang hipotesa yang diangkat dalam skripsi ini yaitu “Amerika Serikat ingin membendung kekuatan Militer China di Kawasan Laut China Selatan melalui Vietnam”.

BAB V : Penutup / Kesimpulan.